

Penerapan Ide Revolusi Prancis di Jawa Pada Awal Abad XIX¹

Djoko Marihandono²
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
djoko_marihandono@yahoo.com

Abstrak

Belanda pada 1795—1813 berada di bawah dominasi Prancis. Kaum Patriot Belanda yang mengagumi Revolusi Prancis melakukan kudeta dengan mengganti sistem monarki menjadi sistem republik pada 1795. Dengan bantuan dana dan tentara, Prancis bersama dengan kaum Patriot Belanda berhasil mendirikan Republik Batavia, yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis. Apa yang terjadi di Belanda, memiliki dampak yang sangat luas di wilayah koloni Hindia Timur, khususnya Jawa. Situasi dan kondisi di Eropa menjelang akhir abad XVIII awal abad XIX dipenuhi oleh perang antara Inggris dan Prancis yang menyeret Belanda terlibat di dalamnya. Kondisi inilah yang menyebabkan terlambatnya perubahan yang terjadi di Hindia Timur, khususnya Jawa. Perubahan ini baru terlaksana 12 tahun berdirinya Republik Batavia, tepatnya tahun 1808. Republik Batavia dibubarkan oleh Napoléon Bonaparte dengan didirikannya Kerajaan Belanda di bawah Raja Louis Napoléon, adik kandung Napoléon Bonaparte pada bulan Juni 1806. Pendirian Kerajaan Belanda didasarkan atas kepentingan Prancis untuk melindungi wilayahnya termasuk wilayah koloninya. Setelah melihat kenyataan lemahnya perlindungan terhadap wilayah koloni, Napoléon Bonaparte mengingatkan kepada Raja Louis bahwa pulau Jawa harus diselamatkan. Harus dicari orang yang mampu membela martabat Prancis di Jawa. Pilihan itu jatuh ke tangan Daendels. Pengaruh Prancis menjadi sangat kental di Jawa tatkala Daendels mendeklarasikan bahwa pulau Jawa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Prancis. Hal ini dilakukannya setelah memperoleh berita dari Paris bahwa Raja Louis telah diturunkan tahtanya oleh Napoléon Bonaparte dan negara Belanda langsung berada di bawah kekuasaan Napoléon Bonaparte (Juni 1810). Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan sampai sejauh mana ide-ide revolusi Prancis diterapkan di Jawa, akan dibahas lebih mendalam dalam makalah ini. Makalah ini ditulis berdasarkan atas sumber primer baik sumber kolonial maupun sumber lokal.

¹ Makalah ini disajikan pada acara International Conference on Indonesian Studies 2011, yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok tanggal 18 dan 19 Juli 2011.

² Penulis adalah pengajar di Program Studi Prancis, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis meminati bidang sejarah, khususnya hubungan antara Eropa dan wilayah koloni di Hindia Timur (yang kemudian disebut Hindia Belanda) pada awal abad XIX. Penulis dapat dihubungi melalui email: djoko_marihandono@yahoo.com

1. Pengantar

Makalah ini ini membahas penerapan ide Revolusi Prancis pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia Timur. Sebelum terjadinya peristiwa penyerangan benteng Bastille di Prancis, masyarakat Prancis menginginkan perubahan sistem ketatanegaraan di wilayahnya. Hal ini diakibatkan dari penderitaan rakyat yang sangat menderita akibat dari beban pajak yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, terjadilah perpecahan di kalangan masyarakat Prancis, yaitu antara kaum Royalis yang taat kepada raja dan kaum republikan yang menginginkan dilakukannya perubahan sistem ketatanegaraan di Prancis. Sementara itu, dengan bercermin dari apa yang terjadi di Prancis, telah mengilhami kaum Patriot Belanda untuk mulai melakukan propaganda menentang rezim *Staadhouder* Willem V dari dinasti Oranye yang saat itu berkuasa. Bertolak dari apa yang terjadi di Prancis, mereka melakukan upaya untuk menggantikan sistem ketatanegaraan mereka. Atas bantuan dari pemerintah Prancis, kaum Patriot berhasil mendirikan Republik Batavia pada 25 Januari 1795. Secara umum, negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis dari 1795 sampai dengan 1813. Dari periode tersebut, secara umum pemerintahan di Belanda dapat dibagi menjadi 3, yakni pemerintahan Republik Batavia di bawah *Raadpensionaris* Jan Rutger Schimmelpenninck (1795—1806), Kerajaan Belanda di bawah Raja Louis (Lodewijk) Napoléon (1806—1810), dan langsung di bawah Kaisar Napoléon Bonaparte (1810—1813). Keadaan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi wilayah koloni di Hindia Timur.³

Mengingat bahwa situasi di Eropa saat itu adalah situasi perang, sementara pemerintahan Republik Batavia tidak mampu untuk mempertahankan wilayah koloninya di sebelah timur Tanjung Harapan, maka Napoléon Bonaparte membubarkan Republik Batavia dan menggantinya dengan dengan Kerajaan Belanda dengan Louis Napoléon sebagai rajanya. Penunjukan Raja Louis sebagai raja Belanda diharapkan mampu untuk mempertahankan wilayah koloni dari Tanjung Harapan ke timur hingga ke wilayah Hindia Timur. Pada Juli 1810, Louis Napoléon diberhentikan sebagai Raja Belanda, karena dianggap melanggar komitmen dengan Kaisar Napoléon, yaitu membiarkan armada dagang Inggris mendarat di Belanda. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diturunkannya Raja Louis dari tahtanya oleh Kaisar Napoléon. Sejak itu, Belanda berada di bawah kekuasaan langsung Napoléon Bonaparte hingga Kaisar Napoléon ditangkap dan dibuang ke pulau Elba tahun 1813.

2. Kondisi Masyarakat Prancis Menjelang Pecahnya Revolusi Prancis

Revolusi Prancis yang ditandai dengan penyerangan penjara Bastille di Paris merupakan simbol dari berakhirnya absolutisme di Prancis. Peristiwa penyerangan penjara Bastille ini akhirnya digunakan sebagai simbol dari Revolusi Prancis. Peristiwa ini bermula tatkala raja Louis XVI naik tahta menggantikan Louis XV yang meninggal dunia. Masyarakat Prancis sangat mendambakan agar Raja Louis XVI mengubah nasib penduduk Prancis yang menderita paceklik akibat kegagalan panen dan tingginya pajak yang harus ditanggung oleh penduduk Prancis. Pada masa pemerintahannya ini, Raja Louis XVI diketahui membantu penduduk koloni Inggris di Amerika Utara untuk memperoleh kemerdekaannya. Setelah perang selama lima tahun, bantuan Prancis yang dipimpin oleh La Fayette, Rochambeau dan Suffren berhasil mendesak Inggris untuk

³ Istilah Hindia Timur digunakan untuk menyebut wilayah koloni Belanda di Asia Tenggara. Pihak Inggris menyebutnya sebagai *East Indie*. Pihak Prancis menyebutkan sebagai *Inde Orientale*. Sementara pihak pemerintah kolonial Belanda menyebutnya *Oostindische*.

mendatangi perjanjian Versailles tahun 1783. Perjanjian ini mendesak Inggris untuk mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Peristiwa kemerdekaan Amerika Serikat menaikkan gengsi Prancis, akan tetapi menghabiskan keuangan Prancis (Henri Grimal, 1967: 77).

Prancis, dengan peristiwa itu, mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, Raja Louis XVI menghendaki agar *Etats Généraux* dibentuk kembali. Tujuan dibentuknya lembaga ini agar para wakil rakyat dapat memutuskan untuk menetapkan sistem pajak yang baru. Sejak Februari sampai dengan Mei 1789, rakyat Prancis mengikuti pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di *Etats Généraux* ini.⁴ Akhirnya pada Mei 1789 terpilihlah anggota *Etats Généraux* dengan jumlah anggota sebanyak 1200 wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, 600 anggota mewakili kelompok Tiers Etats, masing-masing 300 mewakili Noblesse dan Clergé.⁵ Sementara itu, beberapa anggota kelompok Noblesse (bangsawan) dan Clergé (rohaniwan) mulai memberikan simpati kepada kelompok Tiers Etats.⁶

Pada saat yang bersamaan, rakyat Prancis meminta kepada wakil-wakil rakyat agar mereka mau menerima daftar tuntutan rakyat yang tertuang dalam suatu daftar yang mereka sebut sebagai *cahier de doléances*. Daftar ini berisi tentang tuntutan rakyat agar pihak pemerintah mau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Inti dari *cahier de doléances* antara lain:

- a. Pasal I: rakyat menuntut agar monarki Prancis tetap memberikan perhatian yang penuh kepada rakyatnya;
- b. Pasal II: Penghapusan peningkatan pajak yang harus dibayar langsung oleh rakyat;
- c. Pasal III: Penghapusan hak-hak istimewa bagi kelompok bangsawan dan rohaniwan;
- d. Pasal IV: Penghapusan *lettre de cachet*⁷, *Aides* yang dikeluarkan oleh raja;
- e. Pasal V: Penghapusan berbagai macam pajak, seperti *gabelle*, *droits de la nature*;
- f. Pasal X: tuntutan agar rakyat memiliki hak yang sama dalam tugas-tugas sipil, militer atau di bidang lainnya.⁸

Dari *cahier de doléances* ini, rakyat masih mengharapkan agar raja Louis XVI bersedia untuk melakukan reformasi. Kemudian, kelompok ketiga ini menuntut untuk dihapuskannya sistem pemerintahan monarki absolut untuk diganti dengan sistem demokrasi. Berhubung Raja Louis XVI memperoleh informasi yang salah dari orang-orang di sekitarnya, akhirnya ia memutuskan untuk memberlakukan sistem perpajakan yang baru yang memberatkan seluruh rakyat Prancis. (Henri Grimal, 1969: 75-80).

⁴ *Etats Généraux* adalah lembaga perwakilan rakyat, yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih;

⁵ Masyarakat Prancis secara politis, terbagi atas tiga kelompok, yakni: Noblesse (Kaum bangsawan), Clergé (kelompok rohaniwan) dan Tiers Etat (kelompok di luar kedua kelompok itu). Tiers Etats terdiri atas kaum pelajar, kaum borjuis, industriawan, yang tidak masuk dalam kedua kelompok masyarakat Prancis lainnya.

⁶ Sistem pengambilan keputusan di dalam *Etats Généraux* saat itu menggunakan sistem fraksi, artinya di dalam lembaga ini terdapat 4 suara, yang masing-masing mewakili kelompoknya, yakni kelompok Tiers Etat, kelompok Noblesse, kelompok Clergé dan Raja.

⁷ *Lettre de cachet* adalah surat ketetapan raja untuk memungut pajak-pajak khusus, seperti pajak bea masuk. *Les Aides* adalah pajak khusus yang diterapkan untuk minuman.

⁸ *Cahiers de doléances* diawali dari tuntutan penduduk yang tinggal di kota Angoumois, khususnya kaum borjuis yang tinggal di kota itu. Kaum borjuis ingin mengontrol pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menghilangkan perbedaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara Prancis. Lihat Henri Grimal, 1969:76.

Etats Généraux akhirnya bersidang kembali 5 Mei 1789 di Versailles. Raja meminta anggota Etats Généraux untuk membantu raja dalam merestrukturisasi keuangan negara. Dalam sidang tersebut, kelompok Tiers Etats menyatakan dirinya untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Assemblée Nationale*), yang menolak sistem perpajakan yang baru. Mendengar laporan tersebut, pada 20 Juni 1789, raja Louis XVI mengunci dari luar pintu-pintu ruangan tempat para wakil rakyat bersidang. Namun, para wakil rakyat ini malah bersumpah bahwa mereka tidak akan keluar dari ruang sidang⁹ sebelum menghasilkan konstitusi untuk negaranya.

Pada 23 Juni 1789, Raja Louis XVI menyampaikan pidato di depan sidang, dengan mengancam kelompok Tiers Etat untuk segera meninggalkan ruang sidang. Mirabeau seorang tokoh dominan menolak ancaman raja dengan mengatakan bahwa mereka berada di ruang sidang atas kehendak rakyat. Mereka akan keluar dari ruangan itu apabila menghadapi ancaman bayonet. Setelah peristiwa itu, beberapa anggota kelompok Noblesse dan Clergé mulai bergabung dengan Tiers Etat. Dengan suara bulat, kelompok gabungan Tiers Etats, Noblesse dan Clergé, mengganti nama Etats Généraux dengan *Assemblée Constituante*. Namun, Louis XVI tidak menghiraukannya. Untuk mengatasi kemelut ini, ia meminta bantuan Austria untuk mendatangkan pasukan guna mengamankan kota Versailles dan Paris.

Dengan naiknya suhu politik di Paris, dan terbatasnya bahan makanan yang ada di kedua kota itu, pada tanggal 14 Juli 1789, penduduk Paris menyerang penjara Bastille yang digunakan oleh raja Louis XVI untuk menahan para lawan politiknya. Peristiwa ini diikuti oleh penduduk di luar kota Paris yang membakar puri-puri, dan bangunan-bangunan lain yang dianggap sebagai simbol kerajaan, kaum bangsawan dan kaum rohaniwan. Mereka menuntut dihilangkannya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan dan rohaniwan. Sebagai kelanjutan dari peristiwa ini, pada 4 Agustus 1789, kaum bangsawan dan kaum rohaniwan atas inisiatif mereka sendiri, mengusulkan agar hak-hak istimewa dan hak feodal yang mereka miliki dihapus.¹⁰ Keputusan ini sangat mengejutkan Raja Louis. Ia tidak menyetujuinya. Akibat dari keputusannya itu, pada tanggal 5 Oktober Raja dan keluarganya pindah dari istana Versailles ke istana Tuileries di Paris. Sementara itu, Prancis dipimpin oleh kaum revolusioner (Eliana Gardaire, 176: 63-64).

Dengan kerelaan kaum bangsawan dan rohaniwan melepaskan hak-hak istimewa dan hak feodalnya, maka tidak ada lagi perbedaan di antara ketiga kelompok masyarakat itu. Oleh karena itu, *Assemblée Constituante* akhirnya memutuskan untuk memberlakukan *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi hak-hak azasi manusia dan warga negara) pada tanggal 26 Agustus 1789. Inti dari Deklarasi hak-hak azasi Manusia antara lain negara menjamin kebebasan (*liberté*), kesamaan (*égalité*) di antara sesama warga negara.¹¹ Deklarasi ini kemudian menyebar ke seluruh

⁹ Para wakil rakyat bersidang di ruang Jeu de Paume. Oleh karena itu, sumpah mereka untuk tidak akan keluar dari ruang sidang sebelum menghasilkan konstitusi disebut sebagai *Sermen de Jeu de Paume* (Sumpah permainan Paume).

¹⁰ Hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan dan rohaniwan antara lain: mereka tidak membayar pajak, hanya mereka yang dapat menjadi pegawai pemerintah, serta mendapatkan prioritas lainnya.

¹¹ Semboyan *Liberté*, dan *Egalité* merupakan semboyan Prancis sejak dideklarasikannya Hak Azasi Manusia dan Warga Negara hingga Konstitusi 14 Agustus 1830. Dalam perkembangannya, baru pada konstitusi 4 November 1848 (pasal IV), semboyan Prancis diubah menjadi tiga, yaitu *Liberté*, *Egalité* dan *Fraternité*. Untuk lebih jelasnya lihat Godechot, 1970. *La Constitution de la France Depuis 1789*. Halaman 263.

penjuru Prancis, dan semua wilayah mengikuti apa yang terjadi di Paris yaitu membentuk Garda Nasional (*Gardes nationales*) yang menggantikan polisi dan tentara kerajaan (Nembrini, 1985: 84—91). Inti dari deklarasi ini dapat dijabarkan dalam beberapa prinsip, antara lain: manusia lahir dan tinggal secara bebas. Sesama warga negara sama di mata hukum. Mereka memiliki hak untuk menjalankan ibadah. Deklarasi itu juga menyatakan bahwa hak milik adalah suci, sehingga negara melindungi hak milik warga negara.

3. Kondisi Negeri Belanda pada Akhir Abad XVII dan Awal Abad XIX

Prancis sangat berkepentingan dengan wilayah Belanda. Hal ini disebabkan karena wilayah Belanda merupakan akses yang paling mudah bagi Inggris untuk menuju ke daratan Eropa. Perlu diketahui bahwa perseteruan antara Inggris dan Prancis sudah berlangsung lama. Sejak awal abad XV kedua negara itu sudah berseteru, yang dimulai dari perang 100 tahun (*La Guerre de Cent Ans*), perang agama (*la Guerre de Religion*), hingga awal abad XIX. Menjelang akhir abad XVIII, demi pertimbangan keamanan Prancis, khususnya untuk menyelamatkan ide Revolusi Prancis dari ancaman negara lain, Prancis merasa perlu untuk menjadikan negeri Belanda sebagai tameng bagi Prancis. Sistem pemerintahannya pun pada masa Republik Batavia menggunakan sistem direksi yang terdiri atas lima orang di bawah pimpinan Jan Rutger Schimmelpenninck yang saat itu menjabat sebagai *raadpensionaris*.¹² Aneksasi Belanda oleh Prancis sangat berdampak pada wilayah koloni Belanda di Hindia Timur. Penguasa tertinggi di wilayah koloni Hindia Timur, ditetapkan dipimpin oleh Dewan Wilayah Asia (*Raad der Aziatische Bezittingen*) yang terdiri atas sembilan orang. Dewan ini bertugas untuk mengelola wilayah koloni. Pengelolaan wilayah Hindia Timur didasarkan pada undang-undang baru yang akan disusun, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Republik Bataaf (Stapel: 1940: 9—11). Untuk sementara, sebelum dikeluarkannya undang-undang itu, Dewan Wilayah Asia diizinkan untuk memerintah berdasarkan hak-hak istimewa lama yang diberikan kepada kompeni (VOC), yang harus dicabut sebelum tanggal 31 Desember 1799.

Mengingat bahwa perseteruan antara Prancis dan Inggris semakin dahsyat, sementara negara Belanda dianggap sebagai negara boneka Prancis, mau tidak mau, Belanda terseret pada pertentangan antarkedua negara adidaya itu. Pihak Inggris sejak tahun 1800 (tepatnya 23 Agustus 1800), pelabuhan Batavia, pulau Onrust dan Kuipers telah dikuasai oleh Inggris. Bahkan Inggris telah melakukan blokade di teluk Batavia pada 26 Agustus 1800. Batavia terancam jatuh ke tangan Inggris setelah pantai Marunda dikuasai Inggris pada Oktober 1800. Namun, berkat bantuan pasukan yang dipimpin oleh Nicolas Engelhard, pasukan Inggris dapat dipukul mundur dan meninggalkan Batavia pada 9 Nopember 1800. Kondisi darurat masih dialami wilayah koloni Hindia Timur, khususnya di Ternate, karena armada Inggris mengalihkan serangannya ke kepulauan itu. Diberitakan bahwa pada 19 Juni 1801 Ternate jatuh ke tangan Inggris.

Pada saat ditandatanganinya perjanjian Amiens (25 Maret 1802), perang antara Inggris dan Prancis sementara berhenti. Namun, perjanjian itu hanya berlangsung selama satu tahun, karena keduanya saling menuduh melanggar perjanjian itu. Blokade laut atas pulau Jawa oleh Inggris berlanjut. (Stapel, 1940: 11-19). Pecahnya perang

¹² Sistem pemerintahan di Belanda pada masa Republik Batavia meniru sistem pemerintahan di Prancis, yaitu sistem *Directoire*, yang terdiri atas lima orang direktur.

kembali Inggris dan Prancis memaksa Republik Batavia mengganti undang-undang yang diberlakukan di wilayah koloni Hindia Timur dengan undang-undang tahun 1805 yang dikenal dengan nama *Reglement op het Beleid van de Regeering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen en van den Handel op en in dezelve Bezittingen* 'Peraturan Kebijakan Pemerintah, peradilan dan perdagangan di wilayah Asia' pada 27 Januari 1806, yang dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan undang-undang 1804. Undang-undang ini melarang kepemilikan tanah bagi orang Jawa dan menuntut agar orang pribumi disejahterakan dan dimakmurkan. Untuk melaksanakan rencananya itu, Jan Rutger Schimmelpenninck mengirim dua orang ke wilayah Hindia Timur C. Th. Elout untuk menjabat sebagai Komisaris Jenderal dan Dr. Carel Hendrik van Grasvelt untuk menduduki jabatan sebagai gubernur jenderal. Pada saat keduanya berangkat menuju ke pulau Jawa melalui New York, mereka menerima surat yang isinya meminta agar mereka kembali ke negeri Belanda karena Republik Batavia telah dibubarkan dan diganti dengan Kerajaan Belanda di bawah kekuasaan Raja Louis Napoléon (Lodewijk Napoléon) adik kandung Napoléon Bonaparte.

Mengingat bahwa banyak laporan tentang keadaan wilayah koloni di Hindia Timur yang diterima oleh Raja Louis, maka dirasa perlu untuk segera mencari calon gubernur jenderal yang mampu mempertahankan martabat Prancis di Hindia Timur. Banyak laporan yang ia terima, khususnya laporan tentang maraknya korupsi di wilayah ini, masalah pertahanan di Batavia yang sangat rapuh, hingga ketidaksiapan pemerintah Batavia dalam mengantisipasi serangan Inggris atas pulau Jawa. Untuk mengatasi semua permasalahan itu, Jawa harus dipimpin oleh seorang militer yang kuat, yang mampu melakukan perubahan, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Raja Louis Napoléon memanggil Herman Willem Daendels, mantan panglima Legion Etrangère yang telah berjasa banyak dalam menurunkan tahta Stadhouder Willem V dan pendirian Republik Batavia. Ialah satu-satunya orang menurut Raja Louis yang mampu mempertahankan martabat Prancis, khususnya dalam menegakkan ide-ide Revolusi Prancis di wilayah koloni Hindia Timur (Eymeret, 1973:29).

Raja Louis akhirnya mengeluarkan keputusan mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur pada 29 Januari 1807. Pada 9 Februari 1807, ia berangkat menuju ke Jawa dengan terlebih dahulu singgah di Paris untuk menghadap Kaisar Napoléon Bonaparte di istana Tuileries di Paris.¹³ Setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan, pada 1 Januari 1808, ia mendarat di pelabuhan Anyer bersama lima orang ajudannya. Setelah menempuh perjalanan selama 4 hari melalui jalan darat, Daendels tiba di Batavia. Pada 14 Januari 1808, ia secara resmi menerima jabatan

¹³ Pangkat Daendels saat menerima keputusan sebagai gubernur jenderal 29 Januari 1807 adalah Kolonel Jenderal. Mengingat bahwa begitu besar kekuasaan, tugas, tanggung jawab dan luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, pada 9 Februari 1807 sebelum keberangkatannya ke Jawa Raja Louis menaikkan pangkatnya dari kolonel jenderal menjadi marsekalk (Eymeret, 1973:27-29). Tugas utama yang harus dilakukannya adalah mempertahankan selama mungkin pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi negara dengan sistem yang baru agar memberikan kemakmuran bagi negara induk. Tugas utama itu dijabarkan oleh Raja Louis dalam beberapa instruksi, yaitu instruksi untuk gubernur jenderal (37 pasal), instruksi untuk gubernur jenderal dan *Raad van Indie* (25 pasal), serta instruksi untuk membubarkan Pemerintahan Tinggi di Batavia (*Haute Régences des Grandes Indes*) (6 pasal).

gubernur jenderal dari gubernur jenderal yang lama Albertus Henricus Wiese (Stapel, 1940:32-35).¹⁴

4. Penerapan Ide Revolusi Prancis oleh Gubernur Jenderal Daendels (1808—1811)

Sejak menjabat sebagai gubernur jenderal 14 Januari 1808, Daendels melaksanakan apa yang ditugaskannya yang telah ditetapkan dalam instruksi yang diterimanya dari Raja Louis. Instruksi yang diterimanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam Revolusi Prancis, antara lain bahwa hak milik adalah suci. Oleh karena itu, negara akan melindungi semua hal yang telah menjadi milik seseorang, institusi, atau negara. Selain itu, Daendels juga menghargai prinsip *liberté* (kebebasan), yaitu dengan membebaskan para budak, dan melarang sistem anak semang yang saat itu masih berlaku di Jawa. Prinsip ini diterapkan dalam pemberian kebebasan bagi penduduk untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Prinsip *égalité* (persamaan) diterapkan khususnya dalam bidang peradilan.

4.1. Penjaminan hak milik

Dalam menjalankan prinsip melindungi hak milik baik hak milik pribadi, kelompok maupun negara, Daendels memberikan penekanan pada pemberantasan korupsi yang dianggapnya sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki hak milik negara menjadi hak milik pribadi atau kelompok yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Untuk keperluan itu, ia melakukan beberapa langkah untuk memberantas korupsi di wilayah Hindia Timur.

Langkah pertama yang ia lakukan adalah menata kembali gaji pegawai pemerintah. Ia beranggapan bahwa rendahnya gaji yang diterima merupakan faktor pendorong untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum ini. Kebobrokan mental ini dilakukan oleh semua pegawai pemerintah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Untuk mengatasinya, gubernur jenderal menaikkan gaji semua pegawai pemerintah.¹⁵ Ia mengatur penggajian pegawai pemerintah dengan sistem eselonisasi, sehingga aturannya menjadi lebih jelas. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, yakni melarang pegawai pemerintah untuk berdagang. Berdasarkan *Plakaat Boek* (Chijs, 1895), sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji kepada semua pegawai pemerintah, ia mewajibkan semua pegawai pemerintah untuk ikut secara aktif menjual hasil produksi pertanian milik pemerintah yang merupakan komoditas ekspor. Ia mengeluarkan peraturan pada 1 Juni 1808 bagi semua pegawai pemerintah yang melarang untuk menjadi agen hasil bumi yang merupakan komoditas ekspor. Pemerintah akan menghukum siapa saja yang melanggar perintah ini.

Langkah berikutnya yang dilakukannya adalah melarang semua pegawai pemerintah untuk mengirim atau menerima parsel, uang bakti, kepada para pejabat,

¹⁴ Gubernur Jenderal Wiese bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels walaupun tanpa disertai dengan sepucuk surat pun. Hal itu dilakukan oleh Wiese karena ia telah mengetahui pergantian itu dari koran-koran terbitan Amerika, dan dari para pelaut Amerika yang singgah di Batavia (Stapel, 1940: 32-33, Clive Day 1904:148).

¹⁵ Rincian besaran gaji pegawai pemerintah dapat dilihat pada laporan Daendels *Staats der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur General Herman Willem Daendels in de jaren 1808—1811. Bijlagen eerste stukken*, bagian Java's Noord Oost-kust no. 18.

karena menurut gubernur jenderal, hal itu merupakan korupsi pasif. Para pejabat yang menerimanya akan merasa terganggu, bahkan bersifat subjektif yang akan berakibat mengorbankan kepentingan negara.

Dengan ketatnya pengawasan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang tegas, para pegawai pemerintah mulai melakukan korupsi di bidang penyerahan komoditi dagang. Daendels memahami benar bahwa tidak ada ukuran standar tentang penyerahan hasil komoditi dagang kepada pemerintah. Ia paham benar bahwa baik pegawai Eropa maupun pribumi banyak yang melakukan kecurangan dalam penyerahan hasil bumi yang merupakan komoditas ekspor bagi pemerintah. Untuk menghindari kondisi seperti itu, ia mengeluarkan beberapa aturan untuk mengatasi korupsi di sektor ini.

Di salah satu kabupaten di Priangan misalnya, petani menyerahkan kepada bupati sepikul kopi dengan bobot 250 pon. Para bupati menyerahkannya kepada pejabat Eropa dengan bobot 140 pon sepikulnya. Selanjutnya oleh pejabat Eropa, komoditi itu diserahkan kepada negara kurang dari 120 pon per pikulnya. Kelebihan bobot ini menjadi keuntungan pribadi para pejabat itu, di samping 2 ringgit uang kertas yang diterimanya sebagai upah setiap pikulnya. Melihat kenyataan ini, Daendels mengeluarkan keputusan tentang bobot standar per pikul untuk setiap komoditi hasil bumi ini, yakni 120 pon per pikul, yang berlaku dari penyerahan petani ke bupati, dari bupati ke pejabat Eropa hingga ke gudang negara. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Para pejabat yang tidak mungkin lagi mempermainkan bobot timbangan, mencari peluang lain dengan mempermainkan penyusutan bobot saat hasil bumi itu dibawa dari perkebunan ke gudang-gudang pemerintah. Hal ini diketahui oleh gubernur jenderal. Untuk memberantasnya, Daendels mengeluarkan peraturan umum tentang penyusutan bobot dan tarif angkutan pada 19 Oktober 1808. Peraturan ini mengatur tentang persentase bobot yang diizinkan bagi 30 jenis komoditas ekspor. Untuk beberapa jenis rempah seperti lada, jahe, dan umbi-umbian, pemerintah hanya mengizinkan penyusutan berat tidak lebih dari 2%. Untuk berbagai jenis padi, gula, garam, berat penyusutan yang diizinkan tidak boleh melebihi dari 100 bahar setiap koyangnya. Selama transportasi ke gudang pemerintah, kepada semua petugas diinstruksikan untuk tidak menerima penyerahan komoditi itu apabila terjadi kerusakan dalam pengepakannya. Dengan demikian, siapapun yang bekerja di bagian ini harus mengerjakan secara hati-hati, agar paking hasil bumi itu tidak rusak sampai di gudang negara. Demikian pula ditegaskan kepada para petugas di gudang negara agar berhati-hati dalam menjaga komoditi itu agar tidak timbul kerusakan yang disebabkan oleh iklim, hujan, panas matahari ataupun banjir.

Daendels telah menutup semua celah kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai pemerintah agar tidak melakukan korupsi. Namun, ternyata penutupan celah kecurangan ini tidak membuat para koruptor kehilangan akal. Mereka menyuruh penduduk pribumi untuk melakukan pembalakan hutan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kondisi hutan yang rusak tatkala melakukan perjalanan ke Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Ia sadar bahwa hutan di pulau Jawa menyimpan kekayaan yang sangat besar, yang memicu para pegawai pemerintah melakukan pembalakan secara liar demi keuntungan pribadi mereka. Untuk menjaga kekayaan hutan, ia mengeluarkan 6 peraturan tentang pengelolaan hutan ini. Untuk menghindari pembalakan liar, ia memberikan kode pada setiap kayu yang disetorkan ke gudang

negara.¹⁶ Semua kayu sudah ditentukan ukurannya, yang harus disimpan di gudang-gudang kayu pemerintah. Apabila diketahui ada orang yang membawa kayu tanpa adanya kode tersebut, maka kayunya disita untuk negara, sementara orangnya ditangkap kemudian dihadapkan kepada Inspektur Jenderal Kehutanan untuk dijatuhi hukuman.¹⁷

Sebagai akibat dari terputusnya hubungan antara Hindia Timur dan negara Eropa (Baca Belanda) sebagai akibat blokade laut Inggris, pemerintah di Hindia Timur harus melakukan upaya untuk mencari sumber dana yang berasal dari Hindia Timur. Perdagangan komoditas ekspor tidak berjalan karena pembelinya tidak ada. Untuk mengatasinya, Daendels setelah melakukan koordinasi dengan Dewan Hindia (*Raad van Indie*), mencari cara untuk mendapatkan uang. Upaya yang dilakukan adalah menjual tanah-tanah partikelir. Bersama dengan *Raad van Indie*, gubernur jenderal menginventarisir tanah-tanah yang dimiliki negara. Sebelum memutuskan untuk menjual tanah partikelir ini, pemerintah kolonial menyelidiki tanah-tanah yang subur dan yang tidak subur. Tanah yang subur dikelola dengan baik, agar menghasilkan hasil bumi yang laku dijual di pasar dunia, seperti padi, gula dan kopi. Sementara itu, tanah-tanah yang tidak dapat ditanami dengan tanaman komoditas ekspor diteliti status tanahnya. Apabila sudah jelas status kepemilikannya, tanah-tanah tersebut dijual kepada siapa saja yang berminat membelinya baik itu penduduk Eropa, pribumi maupun penduduk timur asing. Tanah-tanah yang dijual tersebut dijamin tanah partikelir dan bukan tanah sengketa. Hasil dari penjualan tanah itu digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, dan keperluan lainnya.¹⁸

4.2. Prinsip Kebebasan (*Liberté*)

Dalam upaya menegakkan kebebasan, gubernur jenderal mengeluarkan instruksi untuk membebaskan semua budak yang ada di Hindia Timur. Para budak ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan militer. Berdasarkan instruksi 16 Februari 1808, semua penduduk baik Eropa maupun pribumi yang memiliki budak, diharuskan membebaskan mereka dan menyerahkan kepada pemerintah. Tujuan pembebasan para budak ini adalah untuk dilatih menjadi tentara pribumi. Sesuai undang-undang koloni Republik Bataf 31 Agustus 1803, komisi penyusun undang-undang koloni Republik Bataf memberikan 7 buah saran dan masukan kepada Napoléon Bonaparte tentang sistem pertahanan di koloni Hindia Timur. Salah satu saran yang diberikan kepada Kaisar Napoléon (pasal 2) berbunyi bahwa “*Di Pulau Jawa dapat segera dibentuk pasukan pribumi yang apabila terjadi perang dapat dilipatgandakan dua atau tiga kali lipat tanpa harus menambah jumlah perwira dan ajudannya yang harus dijabat oleh orang Eropa*”.

¹⁶ Untuk menghindari terjadinya pembalakan liar, pemerintah telah mengeluarkan kode rahasia tentang asal muasal kayu tersebut. Contohnya kayu jati dari Surabaya, diberikan kode S1; kayu jati dari Gresik diberikan kode G2; kayu dari Rembang diberikan kode R3; J4 adalah kode kayu yang berasal dari Juwana; S5 adalah kode untuk kayu dari Semarang; P6 merupakan kode kayu yang berasal dari Pekalongan; Sementara itu, T7 adalah kode kayu dari Tegal dan C8 berasal dari Cirebon. Sementara itu kode I9 merupakan kode kayu yang berasal dari Indramayu. (Lihat Laporan Daendels 1814)

¹⁷ Daendels memberikan hukuman yang sangat tegas bagi para koruptor. Mereka yang merugikan negara di atas 3.000 rijksdaalder, atau setara dengan gaji sebulan seorang residen, akan berhadapan dengan regu tembak. Sangsi ini dilaksanakan dengan tegas selama pemerintahannya.

¹⁸ Lihat J. Hageman dalam ‘*Geschiedenis van het Hollandsch Gouvernement op Java 1802—1810*, dalam *Tijdschrift van Bataviaasche Genootschap voor Indische Taal, Laand en Volkenkunde*. I Jilid IV: 1855:266—368.

Menjelang pemanggilan kembali Daendels ke Eropa, berdasarkan laporan Brigadir Jenderal GH v Gutzlaff, pada 11 Mei 1811, jumlah pasukan pribumi yang ada di pulau Jawa sebesar 13.838 orang. Tentara pribumi ini bergabung dengan 2.430 tentara Eropa dan 1.506 tentara Ambon. Mereka dipusatkan di Benteng Meester Cornelis.¹⁹

Di bidang kehidupan keagamaan, pada saat kedatangan Daendels, di Batavia hanya terdapat satu gereja, yakni gereja Protestan. Kondisi ini telah lama berlangsung mengingat bahwa pada masa VOC hingga kedatangan Daendels, agama Katolik dilarang. Umat katolik jumlahnya sangat sedikit. Gereja mereka kecil dan tidak cukup luas untuk menampung umat yang akan menjalankan ibadah setiap minggunya. Melihat kondisi seperti ini, atas inisiatif Daendels, pemerintah kolonial menyediakan sebidang tanah dengan harapan umat Katolik dapat membangun tempat ibadah mereka. Mengingat bahwa perlakuan pemerintah terhadap umat Katolik sebelum kedatangannya masih mengalami banyak hambatan, Daendels pada 6 *Heerfstmaand* (Februari) 1810 mengeluarkan peraturan tentang pelayanan gereja dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada umat Katolik untuk berkembang. Pelayanan gereja ditetapkan sebagai berikut: Untuk wilayah Batavia dan Batavia Ommelanden, ditetapkan sembilan pendeta reformasi, empat pendeta Luther dan tujuh orang pastor. Wilayah ibukota (Batavia dan Weltevreden), ditetapkan empat orang pendeta Reformasi, empat pendeta Luther dan dua orang guru agama Katolik. Untuk kota Semarang ditetapkan dua pendeta reformasi, seorang pendeta Luther dan dua orang guru agama Katolik. Untuk kota Surabaya ditetapkan dua orang pendeta Reformasi, dua orang pendeta Luther dan dua orang guru agama Katolik.²⁰ Dengan demikian, semua gereja diatur didasarkan pada jumlah umat yang ada di setiap wilayah, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh gubernur jenderal mana pun.

4.3. Prinsip Persamaan (Égalité)

Berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, banyak anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan tidak dapat menuntut keadilan. Sementara itu, lembaga peradilan masih sangat lemah, sehingga azas keadilan dan persamaan hak tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara juga tidak dapat diproses dengan baik karena masih adanya hak-hak istimewa (*privilège*) yang dimiliki oleh sekelompok orang, khususnya di Batavia.

Untuk menjamin terlaksananya instruksi dan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, diperlukan pembenahan di bidang peradilan. Pada 2 Februari 1808, ketika peraturan tentang pemberian sanksi kepada aparatur negara yang menerima hadiah dari penduduk, para pelanggar aturan ini tidak dapat diproses. Hal ini disebabkan lembaga peradilan sebelum kedatangan Daendels belum terintegrasi yang memiliki aturan sendiri-sendiri.²¹

¹⁹ Mobilisasi dan pemusatan pasukan ini dilakukan oleh Daendels setelah ia mendengar kabar dari para pelaut Amerika bahwa Inggris tengah mempersiapkan armadanya untuk menguasai pulau Jawa. Reorganisasi tentara ini dilaporkan oleh Daendels kepada Napoléon Bonaparte, sesuai judul laporan yang dibuat oleh Brigadir Jenderal GH v Gutzlaff pada 11 Mei 1808 (lihat Daendels 1814: *Daendels Staats der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur General Herman Willem Daendels in de jaren 1808—1811. Bijlagen tweede stukken*, Additionele Stukken no. 2.

²⁰ Lihat Daendels, *tweede stukken*, Batavia 46.

²¹ Lihat Idema, HA dalam "Overzicht van de Indische Recht en Staatkundige Geschiedenis 1600-1854" yang dimuat dalam *Koloniall Verslag*, 1928. Idema dalam tulisannya itu mengutip pendapat dari de

Sementara itu pengadilan tinggi hanya terdapat di Batavia dan Semarang. Kesulitannya adalah apabila saksi tidak dapat dihadirkan ke salah satu dari kedua tempat pengadilan tinggi itu, maka sidang tidak dapat dilakukan. Ketidakhadiran saksi ini mengakibatkan sidang tidak dapat dijalankan, sehingga pelaku secara otomatis akan dibebaskan. Pengadilan tinggi Semarang menjangkau wilayah dari sebelah barat Cirebon sampai Banyuwangi timur. Pengadilan ini dipimpin oleh orang Eropa yang dibantu oleh beberapa orang bupati (Stapel, 1940:41). Sementara itu dilihat dari sejarahnya, Pengadilan Tinggi di Batavia pada 9 Oktober 1778 dinyatakan otonom, sehingga gubernur jenderal tidak memiliki hak untuk ikut campur tangan dalam urusan pengadilan ini. Hal ini menimbulkan ketegangan antara lembaga peradilan dan gubernur jenderal, sehingga dikeluarkanlah peraturan tanggal 20 Agustus 1789 yang memberikan hak kepada gubernur jenderal untuk ikut serta dalam permasalahan pengadilan. Ketegangan itu antara lain disebabkan oleh ketidaksediaan pemerintah menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan tindakan kriminal yang dilakukan. (Hageman 1856: 226—230).

Untuk memberikan pelayanan kepada penduduk yang mencari keadilan, Daendels menginstruksikan untuk menambah pengadilan tinggi di Surabaya (*Landraad*), agar masyarakat pencari keadilan yang tinggal di Ujung Timur (Oost-hoek) dapat dilayani.²² Pembentukan badan peradilan dilakukan oleh gubernur jenderal dengan mendirikan peradilan khusus di setiap kabupaten (*vredegericht*). Di setiap *landdrost* atau prefektur didirikan lembaga peradilan (*landgericht*). Siapapun dapat diajukan ke pengadilan apabila melanggar hukum. Sebelum adanya ketetapan hukum yang pasti, terdakwa masih belum dianggap bersalah (*preduga tak bersalah*). Sementara itu di beberapa kabupaten juga didirikan pengadilan musyawarah yang disebut sebagai *vredegericht*.

Dengan didirikannya lembaga peradilan di setiap kabupaten, maka kesulitan untuk menghadirkan saksi dapat dihindari. Lembaga peradilan tetap berfungsi walaupun tidak ada pihak keluarga korban yang menuntut. Negara akan menuntut setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa pun. Demikian pula hukuman yang berupa potong tubuh dilarang keras, karena hal itu akan menimbulkan efek negatif di masyarakat, yaitu munculnya tindak kejahatan baru sebagai tindakan balas dendam (Deventer, 1865:27). Keputusan pengadilan terhadap tindak kejahatan berat yang dapat dituntut dengan hukuman mati, harus dilakukan di pengadilan Tinggi Batavia. Gubernur Jenderal akan mempertimbangkan kembali vonis mati yang dijatuhkan kepada terpidana.

Dalam mengadili semua perkara, keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan. Anggota sidang harus mencari dan menelaah informasi yang diperoleh dari semua saksi. Informasi ini harus digali dan diperoleh sebanyak mungkin sebelum keputusan dijatuhkan. Kepada terdakwa harus disampaikan dakwaannya. Bahkan terdakwa diizinkan untuk melakukan pembelaan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Apabila terdakwa sudah menerima putusan hakim dan tidak mengajukan banding, hakim harus menegaskan hukuman yang diberikan kepada

Haan. Dikatakan bahwa *Apabila seseorang di distrik atau kampung dibunuh tanpa adanya petunjuk tentang pelakunya, distrik atau kampung tersebut wajib untuk membayar harga manusia itu sebesar dua kali lipat dari harga yang ditetapkan.* (Idema, 1928:301—302).

²² Lihat pasal 20 dan 23 instruksi Raja Louis kepada Gubernur Jenderal yang mengatur tentang Lembaga Pengadilan, dan hukum yang harus dijunjung tinggi di seluruh wilayah koloni di Asia.

terdakwa sebanyak dua kali. Apabila sudah tidak ada lagi keinginan untuk banding, terdakwa dapat langsung dieksekusi dan keputusan itu sudah memiliki ketetapan hukum tetap.

5. Kesimpulan

Negeri Belanda pada 1795, yaitu tatkala didirikannya Republik Bataf, hingga 1813, tatkala Napoléon Bonaparte tertangkap dan dibuang ke pulau Elba, berada di bawah dominasi Prancis. Masa pemerintahan Republik Bataf (1795—1806) merupakan pemerintahan demokratis yang mengikuti model pemerintahan Prancis, yaitu mengikuti sistem *Directoire* yang saat itu berlaku di Prancis. Dampak Republik Bataf terhadap wilayah koloni Hindia Timur tidak begitu besar, hal ini disebabkan oleh terputusnya hubungan antara Eropa dan wilayah koloninya sebagai akibat dari blokade laut yang dilakukan oleh Inggris. Sementara itu, ketika sistem pemerintahan di Prancis berubah menjadi kekaisaran (sejak 1 Januari 1805), negeri Belanda juga diubah menjadi Kerajaan Belanda dengan Louis (Lodewijk) Napoléon sebagai rajanya (sejak Juli 1806). Mengingat bahwa Prancis memiliki kepentingan untuk menyelamatkan Hindia Timur dari ancaman Inggris, Raja Louis mengirimkan perwira militer kuat yang diharapkan mampu untuk menjaga martabat Prancis di wilayah ini. Upaya menjaga martabat Prancis ini dijabarkan dalam instruksi yang diberikan oleh Raja Louis kepada Gubernur Jenderal, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta pembubaran Pemerintahan Tinggi di Batavia. Ide-ide Revolusi Prancis kebebasan (*liberté*) dan persamaan (*égalité*) ditegakkan oleh wakil pemimpin Prancis di wilayah Hindia Timur.

Dalam perkembangan selanjutnya, Daendels memproklamirkan bahwa wilayah Hindia Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekaisaran Prancis di bawah kaisar Napoléon Bonaparte tatkala ia menerima instruksi dari Menteri Angkatan Laut dan Koloni pada Februari 1811. Konsekuensi dari penerapan instruksi ini adalah mengganti bendera Belanda dengan bendera Prancis, dan mengganti sumpah yang setiap kali harus diangkat pada saat melantik pejabat baru di Hindia Timur. Inti dari sumpah yang harus diangkatnya adalah para pejabat tunduk dan loyal terhadap pemimpin besar mereka, Kaisar Napoléon.

Walaupun belum merata di semua sektor kehidupan, ide Revolusi Prancis yang berupa kebebasan (*Liberté*) dan persamaan (*égalité*) telah dilaksanakan di Hindia Timur. Walaupun dalam kondisi darurat perang akibat ancaman serangan Inggris, Daendels telah menjalankan ide-ide Revolusi Prancis yang tertuang dalam instruksi yang diberikan kepadanya. Walaupun di mata orang Eropa yang tinggal di Hindia Timur Daendels dianggap sebagai gubernur jenderal yang memiliki watak yang keras, dan bertangan besi, namun di mata pemerintah Prancis Daendels dianggap berhasil mempertahankan martabat Prancis di wilayah kekuasaannya, yakni di Hindia Timur.

Referensi

- Daendels, Herman Willem. (1814) *Staats der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur General Herman Willem Daendels in de jaren 1808—1811*. 's Grafenhage.
- (1814) *Staats der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur General Herman Willem Daendels in de jaren 1808—1811*. Eerste stukken. 's Grafenhage.
- (1814) *Staats der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur General Herman Willem Daendels in de jaren 1808—1811*. Tweede stukken. 's Grafenhage.
- Day, Clive. (1904). *The Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Eymeret, Joël. (1973). "L'Administration napoléonienne en Indonésie" dalam *Revue Française d'histoire d'Outre Mer*. No. 218 Semester I.
- Gardaïre, Eliana. (1976). *La France Vous Connaissez*. Paris: Librairie Marcel Didier.
- Godechot, Jacques. (1970). *Les Constitutions de la France Depuis 1789*. Paris: Garnier-Flamarion.
- Grimal, Henri & Lucien Moreau. (1969). *Histoire de la France*. Paris: Fernand Nathan Éditeur.
- Hageman J. (1855). "Geschiedenis van het Hollandsch Gouvernement op Java 1802—1810", dalam *Tijdschrift van Bataviaasche Genootschap voor Indische Taal, Laand en Volkenkunde*. No. I Jilid IV
- Idema, HA (1854). "Overzicht van de Indische Recht en Staatkundige Geschiedenis 1600-1854" dalam *Koloniall Verslag*, 1928.
- Nembrini, JL, P. Polivka & J. Bordes. (1986). *Histoire: Pour Connaître la France*. Paris: Hachette Classiques.
- Stappel, FW. (1940). *Geschiedenis van Nederlandsche Indie*. Jilid V. Amsterdam: Uitgeversmaatschapij.